

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki keragaman antar daerah yang tinggi, keragaman tersebut merupakan hasil yang nyata dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Wilayah-wilayah dengan potensi sumber daya alam dan lokasi yang menguntungkan dapat berkembang dan menciptakan percepatan pembangunan sedangkan bagi wilayah-wilayah yang tertinggal sering sekali tidak dapat menghasilkan output secara optimal.

Pada skala nasional, kemampuan wilayah dalam menghasilkan output merupakan salah satu penentu tingkat kesejahteraan antar wilayah. Selain itu, penentu tingkat kesejahteraan antar wilayah menjadi tidak seimbang dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi secara makro dan sistem pemerintahan sentralistik yang cenderung mengabaikan terjadinya kesetaraan dan keadilan pembangunan antar wilayah yang cukup besar. Investasi dan sumber daya terserap hanya terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah yang dijadikan pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah-wilayah yang jauh dari perkotaan mengalami eksploitasi sumber daya yang berlebihan.

Pada masa orde baru tahun 1954, sistem pemerintahan di Indonesia menjadi sistem pemerintahan terspusat. Sehingga seluruh aturan dalam pengelolaan sumber daya dan juga potensi daerah diatur langsung oleh pemerintah pusat atau tersentralisasi. Hal tersebut menyebabkan beberapa daerah mengalami pertumbuhan yang cepat, sedangkan daerah lainya mengalami pertumbuhan yang lambat. Sistem

pemerintahan terpusat dijalankan dengan cara memberikan sumber fiskal secara merata ke daerah-daerah tanpa melihat latar belakang potensi yang dimiliki daerah tersebut. Akibatnya daerah memiliki ketergantungan yang kuat dengan pemerintah pusat karena dalam pengambilan keputusan pembangunanpun harus sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah muncul sebagai solusi dalam menangani masalah-masalah yang muncul sebagai akibat dari adanya sentralisasi (Mahardiki, 2013). Sehingga pemerintah daerah dapat mengurus sendiri pembangunan infrastruktur maupun pengembangan potensi masing-masing daerahnya. Adapun dampak yang terjadi adalah terdapat kecenderungan untuk mementingkan daerah sendiri sehingga saling bersaing dalam memaksimalkan pembangunan serta pertumbuhan. Hal ini akan menyebabkan terjadinya distribusi pembangunan antar daerah.

Distribusi pembangunan merupakan salah satu tolak ukur akan tujuan pembangunan nasional dalam meningkatkan stabilitas, pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah serta kesejahteraan penduduk. Ukuran yang paling sering digunakan untuk melihat persebaran antar daerah biasanya dilihat dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Williamson. Koefisiensi variasi ini mengukur persebaran regional dari suatu atribut yang ditimbang dengan proporsi penduduk pada masing-masing daerah (Hudiyanto, 2014). Sehingga dalam analisis ini ukuran yang digunakan untuk merefleksikan ketimpangan pembangunan yaitu Indeks Williamson. Jika dilihat dari Indeks Gini yang juga merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan secara menyeluruh, maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : BPS Indonesia 2016, Portal Data Indoensia

Gambar 1.1.
Gini Rasio Menurut Indonesia Tahun 2010-2015

Dengan melihat pada gambar 1.1 dapat diketahui bahwa ketimpangan yang terjadi di Indonesia mengalami peningkatan sejak tahun 2010 setelah itu cenderung tetap. Jika jumlahnya terus menerus mengalami peningkatan maka dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menghalangi pembangunan. Salah satu dampak persoalan ketimpangan wilayah adalah persoalan daerah tertinggal. Dari data Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia nomor: 001/KEP/M-PDT/II/2005, dapat dilihat pada gambar 1.2 penyebaran daerah tertinggal dalam skala nasional.



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia 2015.

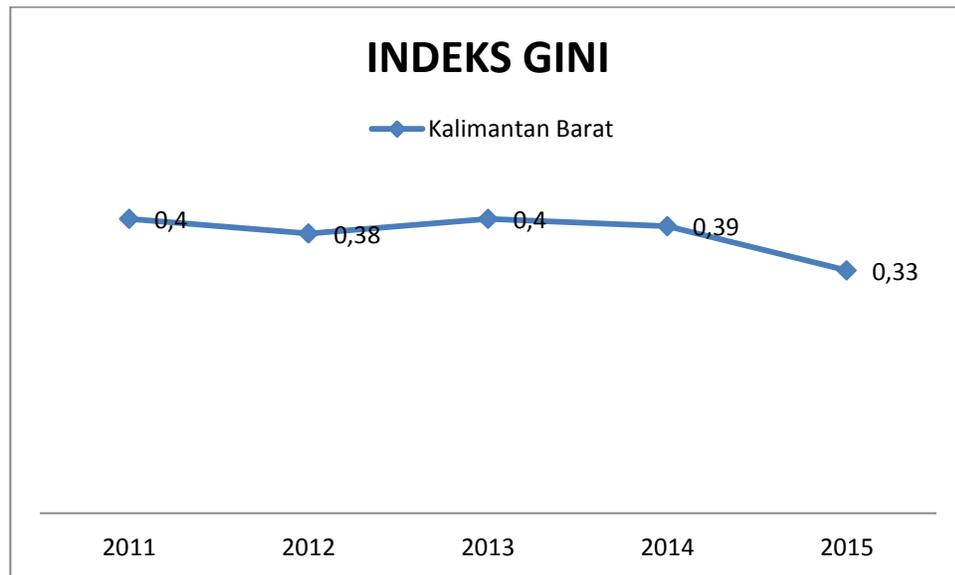
Gambar 1.2.

Peta Jumlah Kabupaten/Kota Daerah Tertinggal di Setiap Provinsi

Menurut Keputusan Menteri Daerah Tertinggal, nomor 001/KEP/MPDT/I/2005, daerah tertinggal ini didasarkan pada enam kriteria: (1) perekonomian masyarakat, (2) kualitas sumber daya manusia, (3) sarana dan prasarana (infrastruktur), (4) kemampuan keuangan lokal, (5) aksesibilitas, (6) karakteristik daerah. Berdasarkan enam kriteria itu serta gambar 1.2 maka dapat terlihat sebagian besar provinsi yang mempunyai kabupaten daerah tertinggal berada di luar Jawa dan daerah perbatasan antar negara. Provinsi di ujung perbatasan Barat yaitu Nanggro Aceh dan ujung Timur Papua merupakan provinsi terbesar dengan kandungan daerah tertinggal, menyusul Kalimantan Barat di perbatasan utara. Tebaran daerah tertinggal memang banyak terlihat pada provinsi-provinsi yang belum tentu jauh dari pusat - pusat kota nasional.

Menurut penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah tertinggal yang sesuai dengan kriteria dari Menteri Daerah

Tertinggal. Untuk melihat perubahan tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat menurut Indeks Gini maka dapat dilihat dari gambar berikut ini :



Sumber : Portal Data Indoensia

Gambar 1.3.
Gini Ratio Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011-2015

Dari gambar 1.3 dapat diketahui bahwa perubahan tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat secara berkala setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun pada dua tahun terakhir mengalami penurunan. Dimulai pada tahun 2011 Indeks Gini sebesar 0,4; selanjutnya pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan menjadi 0,38 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,4 pada tahun 2013. Indeks gini kembali mengalami penurunan hingga tahun 2015, dimana pada tahun 2014 turun sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya menjadi 0,39 selanjutnya pada tahun 2015 penurunan Indeks Gini sebesar 0,6 menjadi 0,33. Penurunan terbesar terjadi pada tahun 2015 jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa menurut Indeks Gini, ketimpangan yang terjadi di Provinsi

Kalimantan Barat pada tahun akhir penelitian menjadi semakin merata walaupun belum diketahui pasti penyebab terjadinya penurunan tersebut.

Selain melihat angka ketimpangan di daerah Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan maka untuk melihat rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sebagai indikator pembangunan di setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat kita dapat melihat tabel 1.1. Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari provinsi ternyata memiliki pendapatan per kapita tinggi seperti Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. Kabupaten ini merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) yang ditentukan oleh Provinsi Kalimantan Barat. Berikut tabel rata-rata pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat :

Tabel 1.1.
Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2015

NO	KAB/KOTA	RATA-RATA LPE (%)	RATA-RATA PDRB PERKAPITA (rupiah)
1	Kab. Sambas	5,61	19.721.037
2	Kab. Bengkayang	5,08	18.584.594
3	Kab. Landak	5,51	15.046.120
4	Kab. Pontianak	5,19	15.340.412
5	Kab. Sanggau	4,61	23.580.254
6	Kab. Ketapang	5,13	27.200.200
7	Kab. Sintang	5,51	18.401.073
8	Kab. Kapuas Hulu	4,64	20.523.581
9	Kab. Sekadau	6,06	16.157.545
10	Kab. Melawi	5,39	13.511.550
11	Kab. Kayong Utara	5,53	18.329.263
12	Kab. Kubu Raya	6,44	24.260.606
13	Kota Pontianak	6,45	31.551.062
14	Kota Singkawang	6,50	25.084.009
KALBAR		5,56	21.882.000

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Data diolah

Menurut BPS (2016) dalam artikel Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Barat 2016, KEK bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan laju pertumbuhan ekonomi dengan mendukung aktivitas ekonomi wilayah di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki nilai tambah. Adapun daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah sekaligus memiliki pendapatan per kapita yang rendah pula seperti Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara keseluruhan pendapatan per kapita antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat tidak begitu tinggi, hanya beberapa daerah saja yang memiliki pendapatan per kapita tinggi dan merupakan daerah perkotaan. Secara tidak

langsung ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat daerah perkotaan di Provinsi Kalimantan Barat relatif lebih baik. Namun ini juga dapat mencerminkan bahwa pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat lebih terfokus pada daerah-daerah tertentu terutama daerah kota yang merupakan konsentrasi penduduk di Kalimantan Barat. Di sisi lain terpusatnya pembangunan di daerah perkotaan menyebabkan perbedaan antar daerah semakin menyolok dan berujung pada perbedaan kesejahteraan masyarakat antar daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis berusaha untuk lebih jauh mengetahui pola/klasifikasi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat diikuti dengan apa saja sektor unggulan yang ada pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan barat serta seberapa besar tingkat ketimpangan pendapatan dan penyebab terjadinya perubahan peningkatan ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

B. Rumusan Masalah

Dari beberapa latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat diambil beberapa perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola atau klasifikasi daerah yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Sektor apakah yang menjadi sektor unggulan tiap kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Barat?
3. Seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan dan penyebab terjadinya perubahan ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui bagaimana pola atau klasifikasi daerah didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Mengidentifikasi sektor unggulan tiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Mengetahui seberapa besar tingkat ketimpangan pembangunan dan penyebab terjadinya perubahan ketimpangan antar daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan gambaran kepada pembaca mengenai ketimpangan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meberikan masukan kepada para pengambil kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terkait.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi maupun refrensi tambahan bagi peneliti selanjutnya khususnya terkait masalah dipasritas pembangunan.